

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang- undang nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional pasal 6 mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7- 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Pasal 34 ayat 3 meenyatakan wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat tersebut aalah pemerintah berkewajiban memberikan layanan pendidikan dan membiayai pelaksanaan program pendidikan, bagi peserta didik pada tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) serta pendidikan sederajatnya.(Bapeda& BPS Magelang, 2013).

Dalam melaksanakan serta mendukung pencapaian program penuntasan wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun (wajar 9 tahun), mengingat bahwa anak Indonesia harus memperoleh pendidikan minimal 12 tahun maka pemerintah mencanangkan program wajib belajar pendidikan 12 tahun tetapi program ini masih dalam proses mengesahkan. Sampai saat ini pemerintah masih dihadapkan pada berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain belum optimalnya pemerataan kesempatan pendidikan, rendahnya kualitas pendidikan.

Maupun terbatasnya anggaran pendidikan, anggaran 2020 menyebutkan bahwa anggaran pendidikan pada 2020 sebesar Rp 505,8 triliun. Anggaran ini hanya naik 2,7% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 492,5 triliun. Padahal, di tahun 2019 anggaran pendidikan mengalami peningkatan sebesar 11,3%. Peralasan tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh negative terhadap kemampuan masyarakat untuk mengakses layanan pendidikan.

Alasan yang melatarbelakangi anak tidak melanjutkan jenjang pendidikan ditingkat SMP dan SMK adalah masalah ekonomi, tetapi tidak hanya masalah ekonomi tetapi juga banyak factor yang mempengaruhi. Hal ini dapat digambarkan pada survey nasional tahun 2018 terhadap anak putus sekolah. Survey tersebut mengungkapkan bahwa banyak alasan anak tidak melanjutkan pendidikan lebih di dominasi oleh kelemahan ekonomi(36%), disusul dengan kurangnya sarana (14%), minat belajar kurang (24%), perhatian orang tua kurang (18%), budaya tidak sekolah (2%), fasilitas kurang memadai (5%), dan faktor lainnya (1%). Gejala putus sekolah, tidak melanjutkan, dan kecenderungan memilih bekerja karena factor ekonomi tersebut jelas mengancam tidak tercapainya penuntasan wajar 12 tahun, yang menjadi prioritas utama dibidang pendidikan.(hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas),2019).

Selama ini pemerintah selalu berusaha memecahkan masalah pemerataan pendidikan. Salah satu upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan bermutu, yang mendapat alokasi anggaran cukup besar adalah program bantuan operasional sekolah atau dikenal dengan BOS. BOS merupakan suatu program pemerintah untuk membantu penyedia pendanaan biaya operasional non operasional sekolah. Program bantuan operasional sekolah dikomandi oleh departemen

pendidikan nasional, yang mana dalam pelaksanaannya, penyaluran dan pengolaan dana BOS yang diterbitkan oleh departemen pendidikan nasional dan departemen agama. Sebagai departemen teknis yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengolaan program BOS(mulyono,2010: 170)

Pemerintah Indonesia masih memprioritaskan pendidikan dasar dalam pembiayaan pendidikan karena pendidikan dasar merupakan landasan utama pendidikan masyarakat Indonesia , namun karena keterbatasan dana bos ini dari pemerintah pusat , maka penggunaan dana BOS prioritas utama adalah penunjang kegiatan belajar mengajar (KBM) dan rehabilitasi gedung sekolah ,penyediaan dan peningkatan kualitas guru melalui peningkatan kerja sama dengan lembaga pendidikan tenaga pendidikan (LPTK) dalam penyediaan guru produktif dan pengusulan pengangkatan guru sekolah menengah.Dalam penggunaan dana BOS sendiri berdasarkan petunjuk pelaksanaan dari pusat harus direncanakan terlebih dahulu dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja masing-masing sekolah.terkait dengan jumlah anggaran pendidikan terkait penerimaan dana BOS untuk siswa SD sebesar Rp 900.000,00, untuk siswa SMP sebesar Rp 1.100.000,00, tingkat SMA sebesar Rp 1.500.000,00 sedangkan untuk tingkat SMK sebesar Rp 1.600.000,00.

Pemerintah secara umum memerikan dana BOS SMK untuk mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua masyarakat dan bantuan yang diberikan pemerintah supaya sekolah membebaskan biaya pendidikan ataupun meringankan tagihan biaya sekolah , dan juga supaya kualitas proses pembelajaran disekolah akan menjadi semakin meningkat. Besara dana tahun 2019 dan 2020 yang diterima tiap sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa persekolah dan

satuan dana BOS SMK. Waktu penyaluran dana BOS SMK ini diberikan ke sekolah per semester. Pengolaan dana BOS wajib perpedoman pda petunjuk teknis BOS SMK yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan SMK, sebagai teknik yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana BOS SMK.

Dengan kemajuan teknologi, pemerintah menganjurkan bagi sekolah penerima dana bantuan operasional sekolah (BOS) wajib melakukan pengupdatean data kedalam sistem data pokok pendidikan (Dapodik) dengan adanya sistem ini pemerintah menegaskan agar pihak sekolah mengoptimalkan sistem pelaporan dana secara online.(juknis bos 2015)

Untuk memudahkan sekolah dalam penyusunan dan pelaporan penggunaan dana BOS, kementerian pendidikan dan kebudayaan telah mengembangkan sistem dan perangkat lunak yang digunakan oleh sekolah, yaitu : 1. Aplikasi laporan pertanggung jawaban keuangan penggunaan dana BOS di tingkat sekolah (alpeka BOS), 2. Pelaporan penggunaan dana BOS secara online (kedua perangkat lunak ini ada dalam laman) (www.bos.kemdikbud.go.id).

Aplikasi ini sangat mudah digunakan dan disusun sesuai dengan juknis BOS. Adanya aplikasi ini mempermudah menyusun laporan-laporan yang wajib untuk dilaporkan dan tidak ada alasan bagi sekolah untuk terlambat dalam melaporkan penggunaan dana bantuan operasional sekolah BOS. Pada tahun 2015 sekolah yang membuat pelaporan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui sistem online sudah mencapai 91% . sehingga pada tahun ini sudah menunjukkan bahwa kedepannya program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak saja perlu di pertahankan tetapi harus dilanjutkan. Masalah yang dihadapi oleh lembaga pendidikan penerima BOS adalah adanya data siswa yang belum terdaftar didapodik, data

rekening sekolah terdeteksi ganda, terkait izin operasional, terkait status sekolah dan penerima BOS, terkait ketepatan jumlah siswa.

Disamping menyiapkan aplikasi BOS untuk pelaporan sekolah harus melengkapi data pendukung berupa: RKAS, Buku kas umum, buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan dokumen lainnya yang diperlukan. Salah satu factor yang mempengaruhi keberhasilan program BOS adalah pengelolaan dana dan segala sumberdaya yang ada dalam program BOS. Pentingnya pengelolaan dana BOS SMK yaitu dengan pengelolaan yang baik akan mampu membantu ketercapaian tujuan dari program BOS SMK dengan efektif dan efisien. Sekolah menempati posisi penting dalam penentuan penggunaan dana BOS SMK, karena sekolah merupakan instansi yang terkait langsung pengelolaan dana BOS. Kesalah pahaman oleh pengelolaan dapat menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan dana BOS SMK hal ini menjadi permasalahan dan dapat menimbulkan dugaan penyelewengan.

Maka dari itu penulis ingin melakukan suatu analisis terhadap pelaksanaan sistem informasi. Tujuan adalah untuk menilai sejauh mana penerapan sistem informasi akuntansi yang dilakukan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Wahana Karya Jl. Mbah Wongso DK. Karang Ploso Bangkingan kecamatan lakarsantri Kota Surabaya serta mendukung sebagai alat pengendalian internal. Oleh karena itu, dengan melakukan analisis ini, diharapkan dapat membantu mengakses atau meminimalkan kendala terhadap pelaporan BOS.

Berdasarkan latar belakang masalah yang disampaikan sebelumnya. Penulis tertarik mengangkat masalah tersebut dalam penelitian ini dengan judul "Evaluasi Sistem Informasi

Akuntansi (Sia) Pengelolaan Dana Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah SMK Wahana Karya Surabaya ”.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalahnya yaitu:

Bagaimana sistem informasi akuntansi pengelolaan dana program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang telah diterapkan oleh SMK Wahana Karya Surabaya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mendeskripsikan sistem informasi akuntansi pengelolaan dana program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMK Wahana Karya Surabaya

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Akademisi

Manfaat teoritis merupakan manfaat hasil penelitian yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan berkaitan dengan objek penelitian. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai referensi baik di bidang pendidikan ataupun

administrasi sekolah yang dapat menunjang untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan bagi penelitian-penelitian yang akan datang mengenai perencanaan penggunaan dana BOS.

2. Bagi Kepala Sekolah dan Guru

Memberikan gambaran umum mengenai pentingnya peraturan dalam perencanaan penggunaan dana BOS dan

pentingnya peran serta guru maupun kepala sekolah dalam penyusunan RKAS.

3. Bagi Komite sekolah

Penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan komite sekolah tentang program BOS, sehingga komite sekolah dapat berperan aktif dalam pelaksanaannya.

4. Bagi Masyarakat / Peneliti Selanjutnya

a. Mengetahui gambaran umum mengenai perencanaan penggunaan dana BOS yang terdapat dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), mulai dari penyusunan, keterlibatan pihak sekolah, pembentukan tim manajemen BOS tingkat sekolah, hingga sumber dana yang diterima sekolah. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar pengetahuan atau bahan pertimbangan untuk penelitian - penelitian yang selanjutnya dengan kajian terhadap sistem informasi akuntansi pemberian kredit.